

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat tema mengenai Program Keluarga Harapan di Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana kinerja PKH di Desa Tapian Nauli I apakah sudah berjalan dengan baik atau buruk.

Kesejahteraan sosial adalah tujuan utama pada setiap negara didunia. Kemiskinan menjadi salah satu hambatan dari kesejahteraan sosial. Fenomena tersebut sering dialami oleh negara terbelakang dan negara berkembang (Dengo, 2017:1-2). Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tidak luput dari permasalahan kemiskinan. tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi yang menyebabkan masalah yang kompleks dan juga menjadi masalah dalam berbagai aspek kehidupan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021. persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022 (BPS 2022).

Suryawati dalam (Malingping et al., 2023:85) Kemiskinan muncul akibat ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan serta kesehatan yang disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar maupun sulitnya

akses terhadap pendidikan dan pekerjaan padahal pendidikan dan Kesehatan merupakan faktor dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. biaya pendidikan yang membuat tidak bisa bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan karena tidak memiliki skil ataupun wawasan pengetahuan yang luas. kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. oleh karena itu pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas umum dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2007 Pemerintahan Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di 7 Provinsi dan 48 kabupaten/kota. dengan adanya program ini diharapkan program ini berkesinambungan serta dapat memutus rantai penyebab kemiskinan. Tujuan Program ini adalah untuk menguji berbagai instrument yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, diantaranya sasaran, validasi data, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) kemudian dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia pada tahun 2013. Program ini terfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang Kesehatan dan Pendidikan. tidak semua RTSM bisa menjadi peserta PKH, hanya keluarga yang mempunyai ibu hamil atau anak usia dini, anak 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh Pendidikan SD-SMA/MA sederajat yang dapat

mengaksesnya. dengan pemberian akses ini, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung tercapainya kesejahteraan sosial.

Dalam jangka pendek dana bantuan PKH bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka Panjang yaitu investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan Kesehatan dan Pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Artinya, PKH diharapkan oleh pemerintah sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sementara secara khusus, tujuan PKH adalah (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan dan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan bagi peserta PKH; (2) meningkatkan taraf Pendidikan peserta; (3) meningkatkan status Kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, balita, dan anak prasekolah anggota Keluarga Sangat Miskin (KSM); (4) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi para peserta PKH.

Setelah diatas diuraikan secara singkat dasar dan tujuan digulirkannya PKH, Program tersebut selintas sangatlah ideal menjadi salah satu solusi untuk mengatasi rantai kemiskinan yang sudah akut. PKH adalah salah satu turunan dalam bentuk relaisasi program paket kebijakan tersebut. Maka patut dikaji dan diteliti kebijakan tersebut agar terlihat dan terbukti bahwa kebijakan tersebut apakah ampuh dalam menangani kemiskinan.

Dibalik keberhasilan dan pencapaian PKH tentulah terdapat beberapa hambatan dan juga kekurangan dalam pengimplementasinya. Berdasarkan hasil penelitian oleh (Masrul Ikhsan, Hafzana Bedasari, 2022:171-175) menyatakan

bahwa Implementasi PKH disana dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di kecamatan Rumbio Jaya sudah berjalan dengan baik dan efektif untuk mengurangi kemiskinan ditingkat kecamatan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya ekonomi RTSM, KPM PKH mengakui bahwa anak-anak mereka kini dapat bersekolah setidaknya hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun dalam pelaksanaannya PKH terdapat faktor penghambat yaitu adanya rasa kecemburuan dari masyarakat yang bukan penerima PKH dan mengizinkan peserta PKH yang dianggap graduasi dihentikan dari bantuan PKH dan digantikan PKH baru.

Dalam penelitian lain oleh (Rika & Pergiwa, 2021, pp. 313-320), bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang dikatakan cukup baik dan berjalan sesuai dengan faktor keberhasilan implementasi.

Berbagai hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa Program PKH di tingkat Kecamatan sudah menghasilkan dampak yang positif dari segi selama pelaksanaan PKH. Untuk itu peneliti ingin melihat dampak pelaksanaan Program PKH untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat desa terkhusus Desa Tapian Nauli I kecamatan Sipahutar. Desa Tapian Nauli I merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara. Desa ini masih terletak jauh dari akses Pendidikan dan Kesehatan. Meskipun akses tersebut sudah dijamin bebas biaya RTSM. Desa Tapian Nauli I merupakan salah satu desa yang melaksanakan Program Keluarga Harapan yakni program bantuan langsung keluarga miskin.

Program PKH sudah berjalan di Desa Tapian Nauli I, sejak tahun 2014 hingga saat ini, Berikut jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Tapian Nauli I kecamatan Sipahutar.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah KPM PKH Di Desa Tapian Nauli I Tahun 2014-2022**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah KPM</b>
1.	2014	23
2.	2015	23
3.	2016	29
4.	2017	29
5.	2018	46
6.	2019	46
7.	2020	46
8.	2021	47
9.	2022	47

(Sumber;Pendamping PKH Tapian Nauli I,14 April 2023)

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penerima PKH dari tahun awal dilaksanakannya PKH hingga 2022 terus bertambah dan bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Program ini tidak terlepas dari masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya yaitu pertama, masih rendahnya pemahaman peserta PKH terhadap maksud dan tujuan PKH, sehingga program ini belum terealisasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak penerima PKH yang tergolong mampu tapi masih memperoleh bantuan PKH sementara masyarakat yang tidak mampu atau yang kategori penerima

bantuan PKH tidak menerima bantuan. Kedua, Pada proses pencairan dana bantuan PKH tidak selalu tepat waktu (wawancara dengan salah satu penerima PKH). Proses pencairan dana yang seharusnya dilakukan dengan tepat waktu, akan tetapi terkendala karena proses verifikasi. Ketiga yaitu penerima PKH sudah terdaftar sebagai penerima bantuan, akan tetapi dana bantuannya belum tercairkan.

Berdasarkan dari paparan diatas, Peneliti tertarik ingin melakukan penelitian lebih lanjut di Desa Tapian Nauli I. Tujuan utama Program ini ialah meningkatkan kualitas hidup mereka dengan akses dan layanan Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu penulis, Mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar?
2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar belakang dan rumusan masalah diatas, Maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kinerja Implementasi Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

##### **a. Secara Teoritis**

Secara teoritis, Penelitian ini dapat menambah wawasan, Pengetahuan dan memberikan kegunaan untuk pengembangan Ilmu Administrasi Publik dalam dimensi Kebijakan. Serta dapat menjadi bahan evaluasi kepada peneliti dan dapat dijadikan sebagai referensi pengkajian masalah Implementasi Program Keluarga Harapan.

##### **b. Secara Praktis**

Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan juga lingkungan sekitar mengenai Program Keluarga Harapan serta faktor pendukung dan hambatan yang mempengaruhi Implementasi Keluarga Harapan (PKH).

#### **1.5 Keaslian dan Posisi Penelitian**

Penelitian tentang implementasi PKH atau Program Keluarga Harapan adalah topik yang luas dan telah banyak diteliti sebelumnya. Namun untuk

membuat penelitian yang memiliki keaslian dan posisi penelitian berikut tinjauan Literatur yang cukup untuk memperhatikan penelitian terbaru tentang PKH.

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Ode & Elwan, 2018:1-17) yaitu tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi dari Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi banyak mengalami kendala dan belum di implementasikan dengan baik.
2. (Virgoreta & Nur Pratiwi, 2018:1-6) menyatakan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan PKH dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan. Dengan bukti bahwa penerima PKH setiap tahunnya mengalami penurunan.
3. Penelitian selanjutnya (Arlina et al., 2021:70-80) menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Cheema dan Rondinelli, peneliti menyatakan bahwa implementasi PKH di desa Liliawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik.
4. Dalam penelitian (Amelia et al., 2023:185-193) menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilaksanakan dengan baik pembentukan kelompok, verifikasi, dan pemutakhiran data dilakukan rutin dan tepat waktu. Bantuan yang



didapatkan sangat membantu peserta PKH untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang akan berdampak meningkatnya derajat Kesehatan.

Posisi dan keaslian penelitian saya yaitu, Implementasi Program Keluarga Harapan Didesa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar. Dengan mengkaji kinerja implementasi pada PKH serta faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi PKH. dengan menggunakan model implementasi menurut Van Horn dan Van Metter.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam setiap penelitian harus mempunyai kejelasan titik tolak yang menjadi landasan berpikir bagi proses penelitian dalam berbagai permasalahan yang diteliti. Teori adalah seperangkat konstruk (Konsep), definisi, proposal yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan fenomena. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak, dia bukan suatu teori. Berdasarkan rumusan diatas maka dalam bagian ini peneliti akan mengemukakan teori pendapat, gagasan yang akan menjadi titik tolak landasan berpikir dalam penelitian ini.

#### **2.1 Kebijakan Publik**

##### **2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Terminologi Kebijakan Publik (*Public Policy*) itu, ternyata banyak sekali, Tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Kebijakan Publik dibuat dengan tujuan tertentu untuk mengatur kehidupan Bersama untuk mencapai tujuan Bersama yang telah disepakati. Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu juga, Kebijakan publik yang dikembangkan atau dibuat oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan salah satu output dan hasil dari proses penyelenggara

pemerintahan, disamping pelayanan publik, regulasi, oleh karena itu substansi dalam proses kebijakan publik akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintah, terutama dalam bentuk negara, bentuk pemerintah dan Sistem pemerintahan. Menurut James A. Aderson dalam (Ayu et al., 2020:3-4) kebijakan publik merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Thomas Dye dalam (Malingping et al., 2023:88) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Konsep tersebut mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah Ketika Pemerintah menghadapi suatu masalah publik, misalnya pemerintah tidak membuat kebijakan Ketika mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak.

Kebijakan Publik dapat dipahami merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam suatu lingkungan tertentu atau negara negara oleh para aktor pembuat kebijakan yang ada dilingkungan tersebut. atau kebijakan publik juga dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik ataupun kepentingan publik.

### **2.1.2 Model Kebijakan Publik**

Hutahaean (2008:41) bahwa Model kebijakan yang akan dijelaskan pada bagian ini adalah kombinasi model yang dikembangkan Gaffar, Dye, Wahab, Model-model yang dimaksud antara lain:

1. Model umum (*General Model*)

Model ini adalah model yang sangat dikenali dalam analisis kebijakan maupun proses kebijakan. Dikatakan model umum, karena memang model ini sangat umum. Pada model ini para aktor kebijakan berinteraksi pada lingkungan yang ada disekeliling mereka (*environment*). Persepsi para aktor kebijakan tentang lingkungan adalah merupakan hal yang sangat penting dalam proses kebijakan. meskipun demikian, lingkungan dapat saja merupakan variable bebas artinya, sekalipun aktor kebijakan tidak mempunyai persepsi atas lingkungannya, akan tetapi lingkungan akan tetap berpengaruh pada aktor kebijakan.

2. Model Perseptual-Proses

Model ini menekankan peranan dari persepsi para aktor-aktor kebijakan publik tentang lingkungan mereka yang berasal dari pemerintah. Model ini menekankan pada bagaimana persepsi pemerintah (dalam arti luas) tentang suatu masalah.

3. Model Struktural

Dalam model ini faktor lingkungan, baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal dianggap sebagai faktor-faktor yang sangat menentukan setiap kebijakan yang diputuskan (*Policy actions*). Model ini akan sangat menguntungkan apabila kita mengamati sebuah kebijakan maupun program yang sedang berjalan, terutama program yang baru berjalan pada tingkat awal. Namun demikianlah, dimensi historis merupakan masalah yang sangat penting berkaitan dengan dampak kebijakan.

4. Model Elite

Model ini merupakan abstraksi dari suatu proses kebijakan dengan mana kebijakan publik dapat dikatakan identik dengan persepsi elite politik. Dalam model ini kehidupan sosial terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan atas dengan jumlah yang sangat kecil yang fungsi selalu mengatur, dan lapisan bawah dengan jumlah yang sangat besar yang berada dalam posisi diatur. Karenanya kebijakan publik mencerminkan kehendak atau nilai-nilai sekelompok kecil orang yang berkuasa.

5. Model Kelompok

Model ini merupakan abstraksi dari sebuah proses pembuatan kebijakan yang didalamnya beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi kebijakan dan bentuk kebijakan secara interaktif. Dengan demikian, pembuatan kebijakan terlihat sebagai upaya untuk menanggapi tuntunan dari berbagai kelompok kepentingan dengan cara negosiasi dan kompromi.

6. Model Rasional

Model ini berasal dari pemikiran Herbert A. Simon tentang perilaku administrasi. Simon menekankan bahwa inti dari perilaku dari administrasi adalah pada proses pengambilan keputusan secara rasional. Karenanya, kebijakan publik haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan. Rasional yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Menurutnya: "Semakin rendah nilai pengorbanan dan semakin tinggi tingkat pencapaiannya, maka suatu

kebijakan dianggap baik. Dengan kata lain, model ini lebih menekankan efisiensi dan ekonomis.”

#### 7. Model Inkremental

Model ini pada dasarnya merupakan kritik terhadap model rasional lebih jauh Lindlon mengemukakan beberapa alasan model inkremental dilakukan:

- a) Model pembuat kebijakan tidak memiliki waktu, intelektualis maupun biaya yang menandai untuk penelitian terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yang merupakan landasan bagi perumusan tujuan kebijakan.
- b) Adanya kekhawatiran tentang bakal munculnya dampak yang tidak diinginkan sebagai akibat dari kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya.
- c) Adanya hasil-hasil program dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan demi suatu kepentingan.
- d) Menghindari adanya berbagai konflik jika melakukan proses negosiasi yang melelahkan bagi kebijakan baru.

### 2.1.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. oleh karena itu beberapa para ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap tujuan pembagian seperti ini adalah untuk mempermudah kita dalam mengkaji kebijakan publik namun demikian, beberapa para ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahapan kebijakan publik menurut William Dunn dalam (Kadir, 2020:19-22) sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda  
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan pada agenda publik. banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.
2. Tahap Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif keputusan perailan dan Tindakan legislatif.

3. Tahap Adopsi Kebijakan  
Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dan mayoritas legislatif konsensus diantara direktur Lembaga atau keputusan peradilan.
4. Tahap Implementasi Kebijakan  
Kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
5. Tahap Penilaian Kebijakan  
Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintah untuk menentukan apakah badan-badan Eksekutif, Legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

## **2.2 Implementasi Kebijakan**

### **2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Nugraho menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik dalam (Pekuwali et al., 2015:7) adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan, ada dua pilihan langka yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan itu. Menurut James A. Aderson dalam (Ayu et al., 2020:3) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Senada dengan itu Laswell dan Kaplan dalam (Ayu et al., 2020:3) menyatakan bahwa, kebijakan publik merupakan kebijakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat, sebab kebijakan mengandung suatu nilai di dalamnya.

Pendapat dari para ahli mengenai pengertian implementasi kebijakan publik diantaranya Van Meter dan Van Horn, mendefenisikan implementasi kebijakan yaitu: Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-

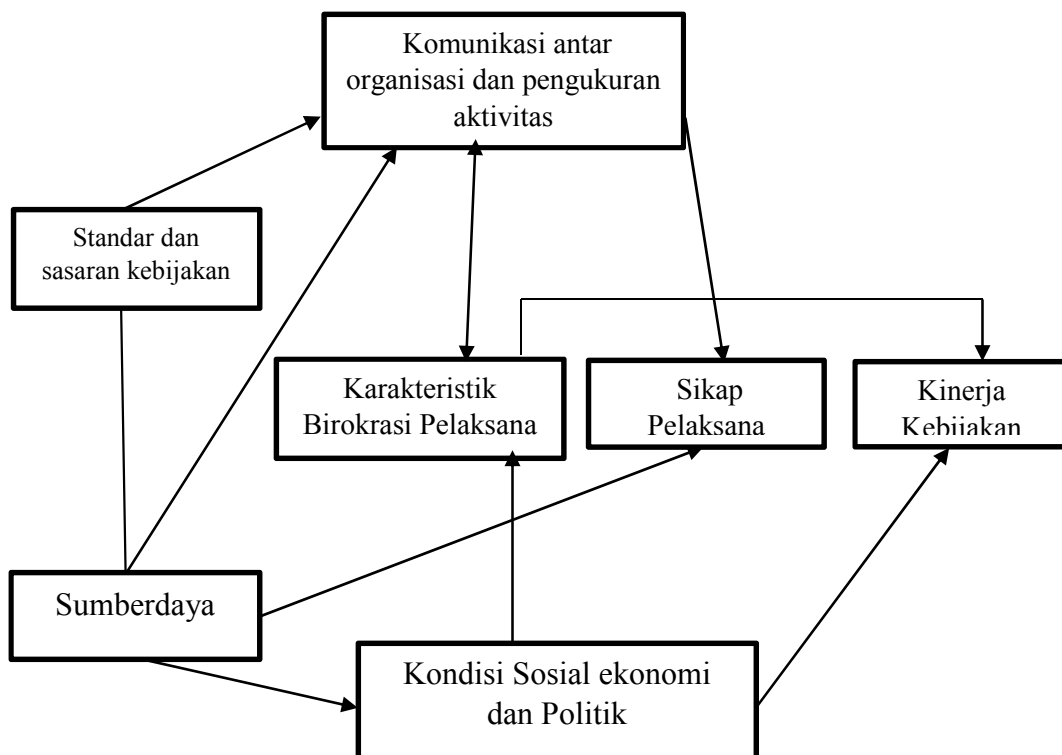
pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Defenisi implementasi berikutnya diungkapkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang mendefenisikan implementasi kebijakan adalah: Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang- undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan - keputusan eksekutif yang pnting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

## 2.2.2 Model Implementasi Kebijakan

### 1. Model Van Meter dan Van Horn

Model pendekatan Implementasi yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn dalam (Kasmad, 2018:45-48) Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, Implementator, dan kinerja implementasi. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi implementasi.

Berikut ini gambar model implementasi kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E Van Horn.





## **Gambar 2.1**

Model Implementasi Kebijakan Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horn

### **2.2.3 Kinerja Implementasi Kebijakan**

Dalam studi implementasi kebijakan hakikatnya memiliki tujuan pokok dalam menjelaskan fenomena. Capaian implementasi yang berbeda, bisa dikatakan kegagalan atau keberhasilan dari suatu kebijakan. Pada intinya, kinerja kebijakan merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian dalam pelaksanaan suatu kegiatan program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan. Sehingga kinerja kebijakan dinilai sangat krusial karena mampu menggambarkan tingkat pencapaian implementasi sehingga muncul penilaian terhadap hasil kebijakan dapat dikatakan berhasil atau gagal.

### **2.2.4 Faktor yang mempengaruhi Kinerja keberhasilan Implementasi**

Banyak variabel yang mempengaruhi kinerja Keberhasilan Implementasi kebijakan. Secara teoritik beberapa pakar memiliki pendapat yang beragam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. George C. Edward III mengemukakan ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Organisasi

Sementara itu menurut Van Metter dan Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi Kinerja Implementasi Kebijakan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Suatu kebijakan tentu telah menegaskan standar dan tujuan tertentu yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas ketercapaian standar dan tujuan tersebut. karena dijadikan sebagai kriteria penilaian Tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan apabila tujuan-tujuan tidak dipertimbangkan.

2. Sumber daya

Yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan publik adalah sumber daya yang tersedia. Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik berupa dana maupun perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam praktek implementasi kebijakan, seringkali didengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Dengan demikian, besar kecilnya dana akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi.

3. Komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktivitas

Kejelasan standar dan tujuan tidak menjamin implementasi efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pengukuran. Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggung jawab. Implementasi akan berjalan efektif bila standar dan tujuan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Dengan demikian tujuan dan sasaran yang jelas, komunikasi yang tepat dengan pelaksana, konsistensi dan keseragaman tujuan dan standar yang dikomunikasikan dengan sumber formasi sangat perlu diperhatikan. Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit.

4. Karakteristik birokrasi pelaksana

- a. Menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Kasmad, 2018:45-48) struktur dari agen pelaksana, meliputi karakteristik, norma dan juga polahubungan yang poyensil maupun aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. karakteristik dari pelaksana dilihat dari struktur birokrasi yang diartikan sebagai karakteristik.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

- a. Kondisi sosial ekonomi dan politik sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Beberapa pertanyaan pokok yang berkaitan dengan variabel ini diantaranya:
- b. Apakah sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi cukup memadai untuk mengejar aktivitas yang tinggi?

- c. Bagaimana keadaan sosial-ekonomi dari masyarakat yang akan dipengaruhi kebijakan?
- d. Apa opini publik yang dominan dan bagaimana pendapat publik terhadap kebijakan?
- e. Apakah elit pemetintah mendukung implementasi kebijakan?
- f. Adakah kekuatan penentang?
- g. Sejauhmana kelompok kepentingan dan swasta mendukung atau menentang kebijakan?

#### 6. Sikap pelaksana

Dari semua variabel diatas membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan untuk pada akhirnya menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Kognisi, netralitas dan obyektivitas para individu pelaksana sangat berpengaruh bentuk respon mereka terhadap semua variabel tersebut. wujud respon individu pelaksana menjadi penyebabnya dari berhasil dan gagalnya implementasi. Jika pelaksana tidak memahami tujuan kebijakan, lebih-lebih apabila system nilai pembuat kebijakan maka implementasi tidak akan efektif. Hal itu juga bisa terjadi bila loyalitas dari pelaksana kepada organisasi rendah.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa Kinerja implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar, mengacu pada Model Implementasi Van Horn & Van Metter dalam (Kasmad, 2018:45-48)

Peneliti menganggap Teori dari kedua Tokoh tersebut cocok untuk menganalisa Kinerja Implementasi PKH. Model ini mengajukan enam variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan.

## 2.3 Kemiskinan

### 2.3.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar makan maupun non makan Syairozi dalam (Faradila & Imaningsih, 2022:29).

Beberapa para ahli yang mengutarakan tentang kemiskinan. Salah satunya menurut Suharto dalam (Ibrahim, 2022:120-121) menyatakan bahwa kemiskinan pada hakikatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan kompleks dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan yang dianggap paling jitu dan sempurna, penemu-kenalan konsep dan strategi penangan kemiskinan harus terus menerus diupayakan.

Chambers dalam (Ibrahim, 2022:121) menyatakan bahwa kemiskinan masih didominasi oleh perspektif tunggal yakni, kemiskinan pendapatan atau “income property”.

Kemiskinan dalam arti luas sebagai keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebab sebuah karya, sebuah negara yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dalam suatu kehidupan, terancamnya rasa keadilan, terancamnya posisi tawar dalam pergaulan dunia dan pada jangka yang lebih panjang akan dapat mengakibatkan hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara (Faradila & Imaningsih, 2022:29).

### **2.3.2 Ciri-ciri Kemiskinan**

Suharto dalam (Nurhaliza, 2020:13-14) menunjukkan bahwa ada Sembilan kriteria yang menandai kemiskinan:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan).
2. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
3. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (buta huruf, rendahnya Pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan)
5. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan asset), maupun misal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum)
6. Ketidadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan.
7. Ketidadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (Kesehatan, Pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).
8. Ketidadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk Pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat).
9. Keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

### 2.3.3 Jenis-jenis Kemiskinan

Mardimin dalam (Pide, 2023:8-9) menyatakan bahwa jenis-jenis kemiskinan dilihat dari keadaan dan penyebabnya yaitu sebagai berikut:

- a. Kemiskinan Absolut  
Bila pendapatannya tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja penuh dan efisien.
- b. Kemiskinan Kultural  
Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- c. Kemiskinan Relatif  
Kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- d. Kemiskinan Struktural  
Kemiskinan ini lebih menuju kepada seorang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah. Ketidaktepatan kebijakan pemerintah juga bisa menyabkan kemiskinan struktural.

### 2.3.4 Program Pengentasan Kemiskinan

Dalam (Daeli, 2019:13) Pengentasan kemiskinan adalah segala tindakan, ataupun suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk

menanggulangi permasalahan kemiskinan yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. Program pengentasan kemiskinan ini merupakan, program yang berada dibawah naungan Kementrian Sosial dalam upaya untuk menekan atau mengurangi tingkat kemiskinan dalam suatu masyarakat atau negara.

Siagian dalam (Daeli, 2019:13-14) menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan harus pula berarti peningkatan mutu hidup menyangkut berbagai segi lain yang bukan berarti segi ekonomis, seperti peningkatan kemampuan untuk menunaikan kewajiban sosial seperti menyekolahkan anak, pengobatan dalam hal seseorang da anggota keluarganya diserang penyakit, tersedianya dana untuk rekreasi, serta peningkatan kemampuan menabung. Singkatnya menjadikan para warga Negara menjadi insan yang mandiri.

Adapun salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah RI adalah:

### **2.3.5 Program Keluarga Harapan**

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah telah melaksanakan PKH. Sebagai bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai layanan Kesehatan dan layanan Pendidikan yang tersedia disekitar mereka.

Anggaran PKH ini berasal dari APBN, dimana kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada dibawah koordinasi dari Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik secara pusat maupun daerah.

### **2.3.6 Tujuan PKH**

Dalam jangka pendek Program PKH bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka Panjang yaitu investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan Kesehatan dan Pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Artinya, PKH diharapkan oleh pemerintah sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

## **2.4 Kesejahteraan**

### **2.4.1 Pengertian Kesejahteraan**

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. kesejahteraan berarti dapat memenuhi kebutuhan pokok atau sandang, pangan, dan papan tanpa adanya kesusahan. Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh Lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Friedlander dalam (Aeda & Jannah, 2022:170-171) tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar Kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak. Selain itu, juga untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin, Kesehatan berpikir dan juga melakukan kegiatan tanpa gangguan, sesuai dengan hak asasi seperti yang dimiliki sesamanya.

Kesejahteraan masyarakat ialah titik ukur bagi suatu masyarakat yang telah berada pada keadaan lebih sejahtera daripada sebelumnya. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang meliputi indikator Kesehatan, Ekonomi, dan Pendidikan (Aliyah, 2022:66-67).

- a. Prinsip dan Faktor Kesejahteraan
  1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
  2. Melepas kesulitan harus diprioritaskan disbanding memberi manfaat.
  3. Kerugian yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.
- b. Indikator kesejahteraan

Menurut Bappenas, status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang Implementasi Program Keluarga Harapan ini sudah pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian -penelitian terdahulu, baik tujuan, Teknik pengumpulan data dan lain sebagainya. Berikut dijelaskan pada dibawah ini.



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Tahun Penelitian	Judul / Artikel	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	Dyah Ayu, Vigoreta, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo.	2018	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Program keluarga harapan di desa Beji Kecamatan Jenu berjalan dengan baik, sesuai dengan teori implementasi dari Merille S.Grindle bahwa semua aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi PKH di desa Beji memiliki peranan yang sangat penting. semua aktor yang terlibat saling berkordinasi untuk mensukseskan program yang dibuat pemerintah.	<p><b>Persamaan:</b></p> <p>Metode atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan dan memaparkan gambaran permasalahan yang terjadi.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Terletak pada lokasi yang berbeda ditiap sudut penelitian, dan waktu penelitian.</p> <p>Penelitian oleh Dyah Ayu, Dkk yaitu ingin mengkaji PKH dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dengan menggunakan teori Implementasi oleh Merille S. Grindle. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan</p>

					adalah berfokus untuk mengetahui bagaimana kinerja Implementasi PKH di Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar dan Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi PKH tersebut.
2.	Rika Kusdinar dan Dewi Inggit Perwira	2022	Implementasi Program Keluarga Harapan Kecamatan Cisitua Kabupaten Sumedang	Peneliti mengatakan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisitua Kabupaten Sumedang dapat dikatakan cukup baik dan berjalan sesuai dengan faktor keberhasilan implementasi. Dan masih banyak kekurangan, dikarenakan pihak pemerintah maupun penyelenggara hanya memberikan fasilitas pokok-pokoknya saja.	<p><b>Persamaan:</b></p> <p><b>Metode</b> atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan dan memaparkan gambaran permasalahan yang terjadi.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Terletak pada lokasi yang berbeda pada penelitiannya, dan waktu penelitian.</p> <p>Penelitian sebelumnya menggunakan teori model implementasi menurut</p>

					Edwards III yaitu: Komunikasi, Sumber- sumber, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu menggunakan teori model implementasi menurut Van Metter dan Van Horn.
3.	Muhammad Guntur, Arlina, Umar Nain.	2021	Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Liliarawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone (Studi Kasus Bidang Pendidikan)	penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone khususnya pada bidang pendidikan kurang terimplementasi dengan baik. Hal ini dikarenakan dari keempat indikator keberhasilan implementasi kebijakan oleh Cheema dan Rondinelli hanya satu indikator yang berjalan dengan baik. Selain itu, faktor pendukung salah satunya adalah bantuan yang diberikan tepat waktu dan jumlahnya	<p><b>Persamaan:</b></p> <p>Metode atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan dan memaparkan gambaran permasalahan yang terjadi.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Terletak pada lokasi yang berbeda pada penelitiannya dan waktu penelitian. Penelitian sebelumnya mengkaji PKH dalam peningkatan Kesejahteraan Keluarga dalam bidang Pendidikan sedangkan</p>

				sesuai dengan ketentuan PKH. untuk faktor penghambatnya adalah data yang digunakan adalah data lama yaitu data tahun 2005 dan tidak ada pembaruan data.	penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu ingin mengetahui bagaimana Kinerja serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi PKH di Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar.
--	--	--	--	---	---

Dari 3 penelitian diatas, menjelaskan bahwa dilaksanakannya PKH ditingkat Kecamatan sudah memiliki pengaruh yang baik dan juga dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan faktor keberhasilan implementasi. Begitu pula dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan mengkaji Implementasi PKH dengan menggunakan teori dari Van Metter dan Van Horn, di Tingkat Desa, khususnya di Desa Tapian Nauli I, Suatu desa yang masih terbelang kekurangan sarana dan prasana dalam pembangunannya serta desa yang masih terbelang Pelosok. Tentu penelitian ini akan menghasilkan hasil yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## **2.6 Kerangka Pikir Penelitian**

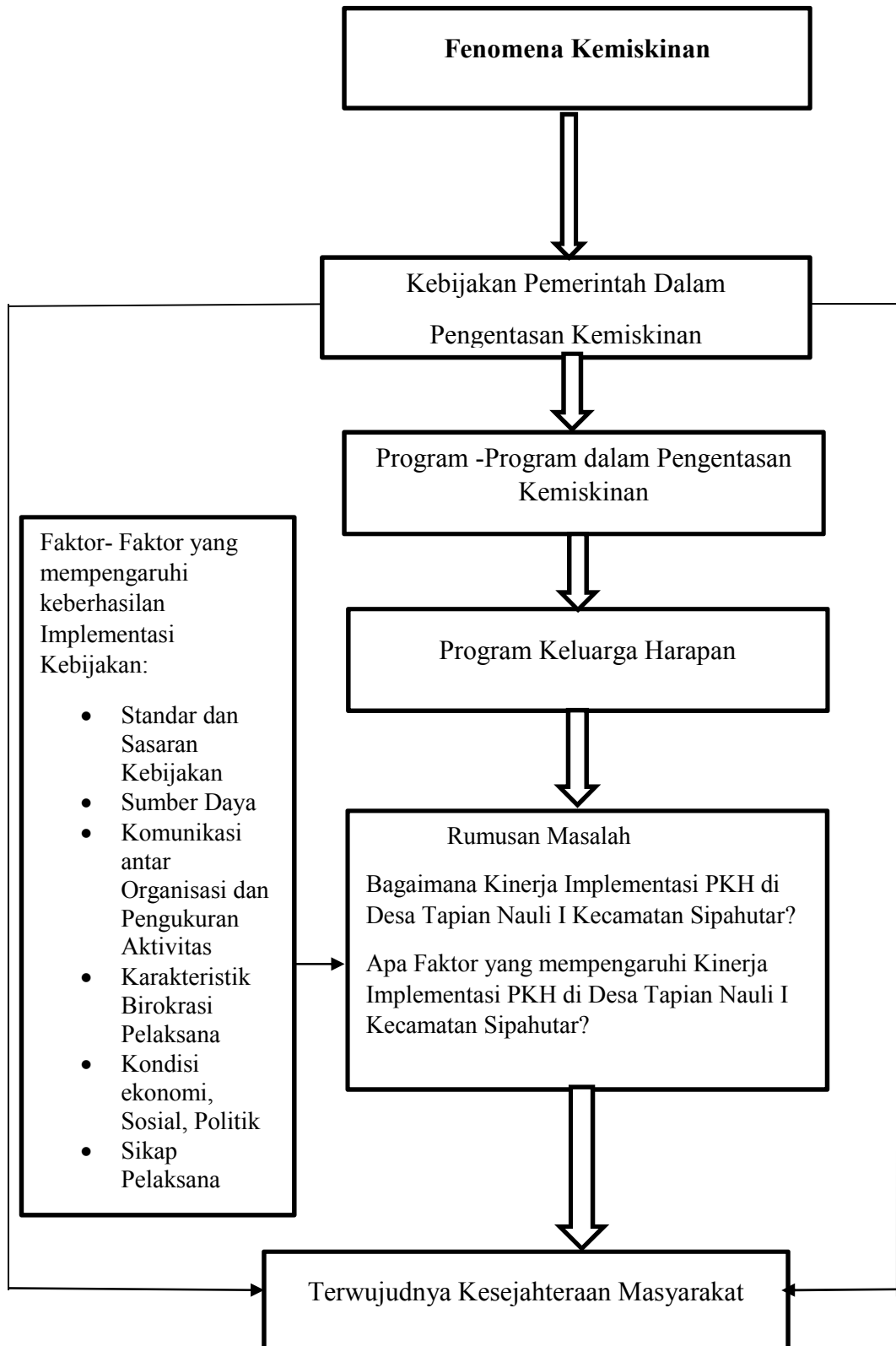
Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam penelitian ini, peneliti merangkai sebuah kerangka berpikir terhadap objek yang akan diteliti antara lain:

Desain penelitian ini didasari oleh adanya fenomena kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. kemiskinan akan menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan, pemerintah mempunyai banyak program yang bermuara kepada masyarakat miskin atau peningkatan jangkauan masyarakat yang tidak mampu atau dikenal dengan Program Keluarga Harapan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini berupaya mengetahui bagaimana kinerja implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar. Pada penelitian ini peneliti mengambil model kebijakan Van Metter dan Van Horn mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktivitas, Karakteristik birokrasi pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, Sikap pelaksana. Indikator yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn merupakan model implementasi tipe top-down sesuai dengan Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar dari sisi yang terpusat dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah.

Berikut ini adalah adalah merupakan gambar kerangka berpikir dalam penelitian yang akan diteliti:

**Gambar 2.2 Kerangka Berpikir**



**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud ingin memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar.

**3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Sipahutar. Peneliti memilih Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar

**3.3 Waktu Penelitian**

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian Skripsi**

No.	Jenis Kegiatan	Feb 2023	Mar 2023	April 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Ags 2023	Sept 2023
1.	Persiapan Penelitian								
2.	Pengajuan Judul								
3.	Penyusunan Proposal								
4.	Seminar Proposal								
5.	Revisi Proposal Penelitian								
6.	Perencanaan Penelitian								
7.	Pelaksanaan Penelitian								
8.	Pengolahan Data								



9.	Penyusunan Skripsi								
10.	Sidang Skripsi dan Revisi								

### 3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian Kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ketempat lain pada situasi sosial pada kasus yang diteliti. Oleh karena itu situasi sosial pada kasus yang akan diamati oleh peneliti adalah pengamatan terhadap Kinerja Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Tapian Nauli I. Dalam penelitian ini untuk menentukan informan yang akan digunakan dalam penelitian.

Yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan Kunci, merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi Informan kunci yaitu Pendamping PKH Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar.
- b. Informan Utama, dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan utama yaitu masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan di Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar.

### 3.5 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian yaitu data Primer dan data Sekunder yaitu sebagai berikut:

#### A. Data Primer

Data Primer merupakan data yang bersumber langsung dari informan pada saat melakukan penelitian. Yang menjadi data Primer adalah data tentang Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar (Creswell John.w, 2013:274). Teknik yang digunakan untuk memperoleh Data Primer adalah:

a) Wawancara

Dalam wawancara kualitatif peneliti dapat melakukan dengan berhadapan langsung dengan partisipan, atau mewawancarai mereka dengan telepon atau terlibat dalam focus group interview. Wawancara seperti itu memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur yang dirancang memunculkan pandangan dan opini dari partisipan (Creswell John.w, 2013:267-268).

**B. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan yang memiliki relevansi terhadap fokus penelitian dalam hal ini yang menjadi data sekunder yaitu arsip dan laporan dalam Program Keluarga Harapan di Desa Tapian Nauli I Kecamatan Sipahutar (Creswell John.w, 2013:274). Teknik yang digunakan untuk memperoleh Data Sekunder adalah:

a) Dokumentasi

Selama penelitian, Peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat seperti (diary atau buku harian, surat, e-mail) (Creswell John.w, 2013:267-268).

### 3.6 Teknik Analisis Data

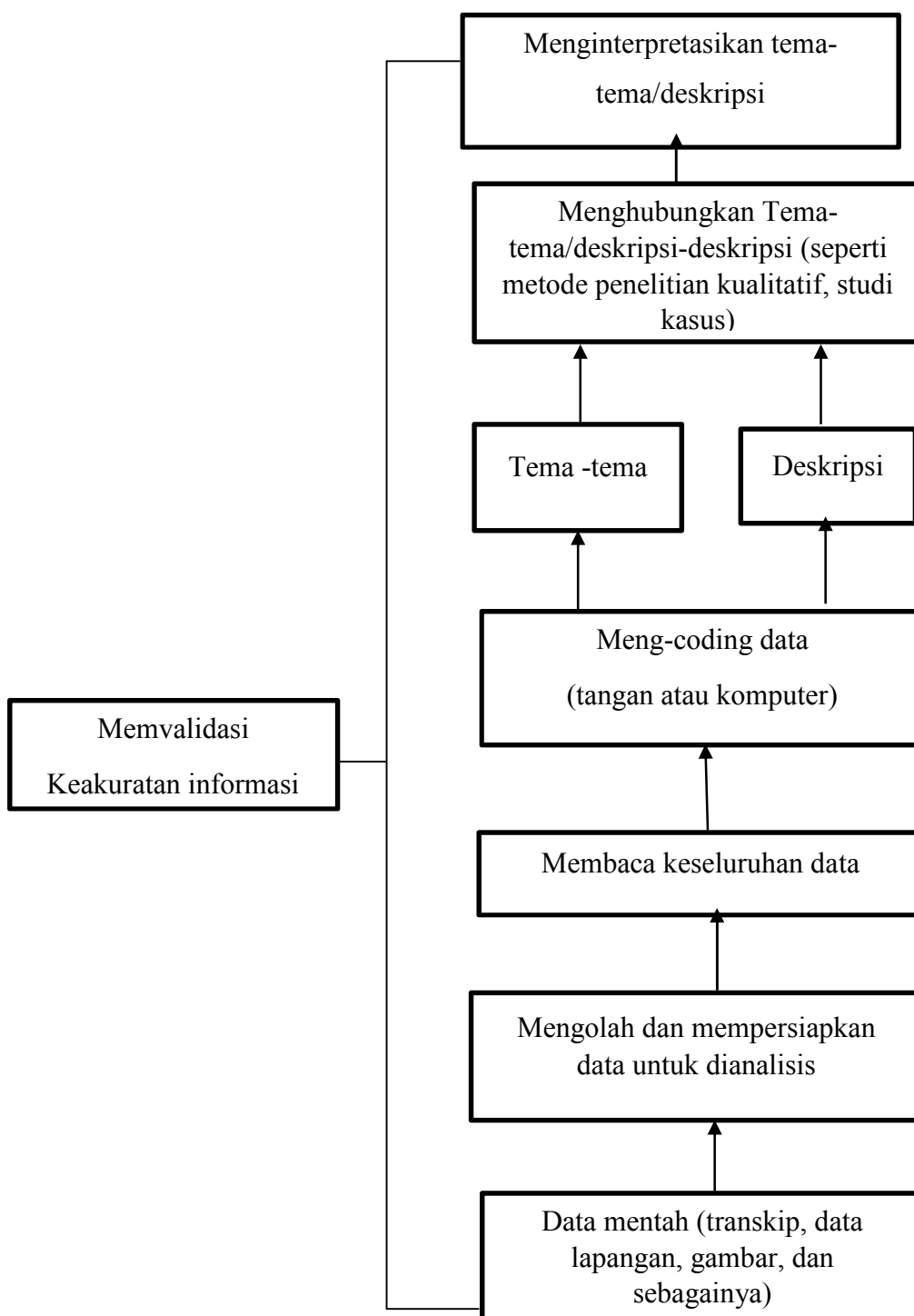
Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka dan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari para partisipan. Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian Kembali untuk menunjukkan proposal awal suatu penelitian. (Creswell John.w, 2013:276-277)

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Dalam Langkah ini melibatkan transkrip wawancara dan scanning materi, menulis data serta memilah dan Menyusun data tersebut ke dalam jenis- jenis yang berbeda tergantung sumber informasi yang didapatkan.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun generealense atas informasi yang diperoleh dan mereflesikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis secara detail dengan meng-coding data. Coding data merupakan proses pengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Dalam Langkah ini melibatkan beberapa tahapan mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mengsegmentasi kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf.
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang dianalisis. Dalam hal ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail megenai orang-orang, lokasi-lokasi, peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema yang akan disajikan Kembali dalam narasi/laporan kualitatif.

- Langkah yang terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi data atau memaknai data.

**Gambar 3.1 Teknik Analisis Data**



**Sumber: Jhon W. Creswell (2013:227)**

